



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 860/IV/2015

V/APRIL 2015



Konferensi Parlemen Asia Afrika Tegaskan Dukungan Pada Palestina



Konferensi Parlemen Asia Afrika Tegaskan Dukungan Pada Palestina



Ketua DPR RI Setya Novanto bersama Presiden RI Joko Widodo memasuki Ruang Sidang

Konferensi Parlemen Asia Afrika menghasilkan 24 butir kesepakatan diantaranya mengenai butir solidaritas untuk Palestina, Perdamaian, Kesejahteraan dan Kerjasama Asia Afrika di masa mendatang.

Dari 24 butir kesepakatan yang disepakati oleh seluruh Delegasi Parlemen Asia Afrika, di Gedung Pustakaloka, Kamis Malam, (23/4), terdapat isu yang paling menarik yaitu mengenai solidaritas untuk Palestina, dimana Parlemen Asia Afrika mendukung Palestina menjadi negara observer di PBB sebagai bentuk pengakuan internasional atas keberadaan Palestina dan hak kedaulatan terhadap wilayah mereka.

Pada butir kesepakatan itu, Parlemen Asia Afrika juga mendukung Palestina melalui berbagai cara diantaranya bentuk kerjasama didalam Asia Africa Strategic Partnership (NAASP). Selain itu, Parlemen Asia Afrika juga menolak segala bentuk perubahan karakter dan identitas dari Kota Yerusalem yang mengkotak-kotakan tempat peribadatan suci umat Islam dan Kristen serta mengedepankan konflik beragama sebagai faktor utama konflik antara Palestina dan Israel.

Parlemen juga mendukung perdamaian dan berakhirnya pendudukan Israel atas dataran tinggi Golan, perkebunan Sheba Lebanon dan wilayah

Palestina sejak tahun 1967. Seluruh delegasi juga meminta Pemerintah Israel untuk melepas seluruh tahanan Palestina dan anggota parlemen tanpa proses hukum.

Terkait persoalan kejahatan transnasional terorganisir, seluruh anggota parlemen menolak segala bentuk terorisme dan manifestasinya. termasuk juga perusakan benda bersejarah serta penyelundupan benda bersejarah tersebut baik langsung maupun tidak langsung dari situs arkeologi, museum, perpustakaan, arsip, dalam berbagai bentuk dan cara yang dilakukan oleh *Al Nusrah Front* (ANF) *Boko Haram* dan *Daesh Islamic State* (IS).

PENGAWAS UMUM: Pimpinan DPR-RI | **PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH:** Dr. Winantuningtyastiti, M. Si (Sekretaris Jenderal DPR-RI) | **WAKIL KETUA PENGARAH:** Achmad Djuned SH, M.Hum (Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI) ; Tatang Sutarsa, SH (Deputi Persidangan dan KSAP) | **PIMPINAN PELAKSANA:** Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si. (Karo Humas dan Pemberitaan) | **PIMPINAN REDAKSI:** Dadang Prayitna, S.IP. M.H. (Kabag Pemberitaan) | **WK. PIMPINAN REDAKSI:** Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan), Mediantoro SE (Kasubag Pemberitaan) | **REDAKTUR:** Sugeng Irianto, S.Sos; M. Ibnur Khalid; Iwan Armanias; Mastur Prantono | **SEKRETARIS REDAKSI:** Suciati, S.Sos ; Ketut Sumerta, S. IP | **ANGGOTA REDAKSI:** Nita Juwita, S.Sos ; Supriyanto ; Agung Sulistiono, SH; Rahayu Setiowati ; Muhammad Husen ; Sofyan Effendi | **PENANGGUNGJAWAB FOTO:** Eka Hindra | **FOTOGRAFER:** Rizka Arinindya ; Naefuroji ; M. Andri Nurdriansyah | **SIRKULASI:** Abdul Kodir, SH | **ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:** BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI, Lt.II Gedung Nusantara III DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com; www.dpr.go.id/berita

Pada kesempatan itu, butir kesepakatan juga mengajak seluruh negara Parlemen Asia Afrika untuk berjuang bersama dalam memberantas terorisme, ekstremisme dan group radikal

diantara anggota Parlemen Asia Afrika serta berkontribusi dalam melakukan mitigasi terhadap penduduk yang ingin bergabung dalam organisasi, serta saling tukar informasi antar negara

dalam membangun strategi bersama memberantas kelompok terorisme. (Si) foto: andri/parle/od

Beberapa poin yang disepakati peserta Konferensi Parlemen Asia Afrika adalah sebagai berikut:

1. Peserta Konferensi Parlemen Asia-Afrika menyepakati untuk memperkuat peran parlemen dalam kerangka kerjasama selatan-selatan dan promosi perdamaian dan kemakmuran dunia.
2. Peserta Konferensi Parlemen Asia-Afrika menyepakati untuk meneguhkan komitmen Dasasila Bandung dengan semangat solidaritas, persahabatan, dan kerjasama sebagai prinsip pokok. Komitmen ini akan terus dirajut di antara pemerintah dan parlemen negara-negara Asia-Afrika guna memecahkan masalah global yang menjadi keprihatinan bersama.
3. Konferensi Parlemen Asia-Afrika menegaskan komitmen mendukung kemerdekaan Palestina dan kedaulatan wilayahnya sesuai tahun 1967.
4. Konferensi Parlemen Asia-Afrika mengutuk keras seraya menuntut agar Israel membebaskan tahanan parlemen Palestina yang ditangkap secara semena-mena dan tanpa proses peradilan yang memadai
5. Selain itu, Konferensi Parlemen Asia-Afrika menegaskan komitmen parlemen negara-negara Asia-Afrika untuk terlibat sedini mungkin dalam agenda pembangunan global SDGs.
6. Sebagai upaya mewujudkan kerjasama Asia-Afrika ke depan, Konferensi Parlemen Asia-Afrika mendukung ide pembentukan *Asia Africa Parliamentary Group*.

DPR Apresiasi Kritik Presiden Terhadap PBB

Pidato Presiden Joko Widodo yang mengkritik dan menyerukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk direformasi, sangat diapresiasi DPR. PBB selama ini hanya dikuasai segelentir negara maju yang tidak adil memberi peluang kemerdekaan kepada semua negara, terutama di Asia dan Afrika.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengakui, pidato Presiden Jokowi di hadapan para pemimpin negara Asia Afrika dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika, sangat bagus. Menurutnya, baru kali ada presiden Indonesia yang berani mengkritik organisasi internasional tersebut setelah mendiang Presiden Soekarno tentu.

“Soal reformasi PBB sudah banyak disuarakan, tapi baru kali ini Presiden RI menyuarakan tentang reformasi PBB. Saya sangat apresiasi. Ini penting, karena formasi PBB sangat tidak adil,

dipimpin oleh negara-negara yang punya hak veto. Itu tidak demokratis sama sekali. Jadi PBB itu harus dirombak,” ungkap Fadli, usai mengikuti pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika, Kamis (23/4).

Fadli juga mengapresiasi kritik presiden terhadap Bank Dunia dan IMF. Dengan kritik itu, pemerintah diharapkan konsisten untuk tidak lagi berutang pada dua lembaga keuangan dunia tersebut. “Pidato Pak Jokowi kemarin (22/4), saya kira bagus, termasuk pidato yang keras, mau mengkritik Bank Dunia dan IMF. Tapi sebaiknya kita juga konsisten. Kalau kita mengkritik Bank Dunia jangan kita berutang ke Bank Dunia dan IMF. Konsistensi penting untuk dicatat. Semangat dari pidato itu sangat bagus. Kita dukung. Artinya, kita ingin jadi bangsa yang mandiri dan berdikari.”



Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon

Sementara mengomentari rencana pemerintah membuka KBRI di Ramallah, Palestina, Fadli juga mengapresiasi. Menurutnya, rencana tersebut sebenarnya merupakan janji Presiden saat kampanye dulu. “Janji itu masih diingat oleh masyarakat. Saya kira sebaiknya segera diwujudkan. (mh) foto: naefuroji/parle/od

Ketua DPR Dorong Dibentuknya Forum Parlemen Asia Afrika

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Setya Novanto tidak ingin hasil pembahasan di Konferensi Parlemen Asia Afrika hanya menjadi sebuah wacana.

Dalam sambutannya di hadapan delegasi dari berbagai negara, Novanto mendorong dibentuknya Forum Parlemen Asia Afrika.

“Perlu kerja sama konkret di infrastruktur, ekonomi, energi. Oleh karena itu, perlu dibangun komunikasi efektif antara dua benua, antar parlemen



Ketua DPR RI Setya Novanto memberikan sambutan pada Pembukaan Konferensi Parlemen AA

Asia Afrika,” kata Novanto di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Ia mengharapkan Forum Parlemen Asia Afrika bisa menjadi ajang diplomasi dunia. Novanto tidak ingin hasil konferensi Parlemen Asia Afrika ini hanya menjadi sejarah.

“Kami usulkan pembentukan Forum Parlemen Asia Afrika sehingga membuat pelaksanaan ini tidak hanya bernilai sejarah seperti KAA 60 tahun lalu tapi ada proker konkret. Peserta konferensi ini ingin lihat perdamaian kesejahteraan di Asia Afrika,” ujarnya.

Konferensi Parlemen Asia Afrika ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 33 negara. Akan ada sejumlah isu yang dibahas dalam beberapa sesi hari ini dan ditutup dengan *gala dinner*.

Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai ketua *Global Green Growth Institute* turut menjadi pembicara dalam konferensi ini. (sc) foto: [naefuroji/parle/od](#)

Kawasan Asia Afrika Akan Menjadi Pemain Global di Masa Datang

Kawasan Asia Afrika pada abad mendatang akan menjadi pemain global dimana pertumbuhan GDP akan mencapai separuh GDP dunia pada tahun 2050 nanti.

Pendapat itu disampaikan oleh Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf saat membuka acara Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung Nusantara, Kamis, (23/4).

Menurut Nurhayati, Asia nanti akan menjadi pusat mesin pertumbuhan ekonomi global dibarengi oleh pertumbuhan Afrika. “Dengan kombinasi GDP mencapai Rp17.4 Triliun pada 2030 mendatang, maka Asia dan Afrika akan menjadi pemeran utama dalam kancah pertumbuhan dunia,” jelasnya.

Dia mengatakan, generasi pertama pemimpin besar di Benua Asia dan Afrika telah membentuk kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dunia, kesejahteraan dan juga mitra strategis antar kawasan.

“KAA bandung meninggalkan warisan yang berharga seperti kerjasama yang berdasarkan saling menghargai kedaulatan dan integritas negara masing-masing,” jelasnya.



Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf

Pada kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengaku sangat mendukung tema yang diangkat dalam konferensi parlemen tersebut yaitu *Strengthening the Role of Parliament in South-South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity*. Tema itu, pasalnya, sejalan dengan pidatonya dalam pembukaan Konferensi Asia Afrika (KAA).

Negara-negara Asia-Afrika, lanjutnya, juga diuntut untuk melakukan konteks aktualisasi tiga nilai utama yang dulu diperjuangkan pada KAA

60 tahun lalu. Yaitu kesejahteraan, solidaritas, dan stabilitas. Kontekstualisasi itu, tegasnya, bukan hanya tugas pemerintah tapi juga DPR.

“Karena itu, saya sangat gembira karena agenda-agenda yang akan dibahas dalam sidang parlemen Asia-Afrika sejalan dengan persoalan-persoalan dalam KAA yaitu masalah perdamaian dan kesejahteraan, peningkatan kemitraan strategis baru Asia-Afrika dan solidaritas untuk Palestina,” terangnya. (Si) foto: [andri/parle/od](#)

Kemerdekaan Palestina Jadi Bahasan Khusus Konferensi Parlemen Asia Afrika



Ketua DPR RI Setya Novanto

Kemerdekaan Palestina akan menjadi pembahasan khusus dalam Konferensi Parlemen Asia Afrika yang digelar untuk pertama kalinya hari ini di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat, Senayan, Jakarta.

Pasalnya, menurut Ketua DPR Setya Novanto, memerdekakan Palestina adalah hutang sejarah yang harus dituntaskan.

“Konferensi Parlemen Asia Afrika diharapkan dapat memberikan kekuatan baru yang efektif untuk memberi jalan memperjuangkan kemerdekaan Palestina ke depan. Kita dan rakyat Asia Afrika akan tuntaskan hutang sejarah yaitu memerdekakan Palestina,” kata Novanto saat memberikan sambutan dalam Bahasa Indonesia di hadapan anggota Parlemen Asia Afrika di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Ia berharap Konferensi Parlemen Asia Afrika dapat menjadi solusi untuk dari masalah dunia yang semakin kompleks. Novanto menekankan kebutuhan kerjasama dengan target yang nyata.

“Kemitraan Asia Afrika untuk bisa melangkah maju sesuai kebutuhan nyata untuk memperbaiki masa depan yang lebih damai bagi rakyat dua benua,” ujar politikus Golkar ini.

Hadir dalam acara pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika Presiden Joko Widodo (Jokowi), mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dan Marzuki Ali, kepala lembaga negara, dan menteri-menteri kabinet kerja. (sc) foto: [denus/parle/od](#)

Problem Utama Bangsa Asia-Afrika Kemiskinan

Anggota Komisi IX DPR M Ali Taher menilai pidato Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika (KAA) di Gedung DPR Kamis (23/4) itu adalah faktual. Sesungguhnya yang dipaparkan soal kemiskinan artinya tidak tercukupinya sandang, pangan, dan papan.

“Jika melihat konteks negara-negara Asia Afrika itulah yang menjadi problem utama sekarang ini. Karena itu kita mendorong kebersamaan diantara negara-negara Asia Afrika untuk meningkatkan hubungan, bukan hanya bidang politik tetapi juga di bidang pertahanan keamanan serta bidang sosial dan ekonomi,” tukasnya.

Dalam pidatonya SBY mengungkapkan bahwa masih sekitar 70% penduduk miskin yang ada di seluruh dunia termasuk Indonesia. Data itu faktual, maka para anggota parlemen perlu mendorong Pemerintah untuk membuka lapangan-lapangan kerja, membuka lahan-lahan baru pada sektor pertanian. Dengan demikian bisa meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan.

Apalagi lanjut Ali Taher, penduduk Indonesia yang tidak tamat SD dan SMP kurang lebih 62 juta orang. Mereka memerlukan lapangan pekerjaan sehingga ketika lapangan kerja itu dapat terpenuhi, diharapkan ada peningkatan kualitas hidupnya. Selanjutnya, sektor lain termasuk kesehatan harus mendapat perhatian secara khusus.

Menurutnya, banyak orang Indonesia yang terkena pe-



Anggota DPR M Ali Taher memimpin doa

nyakit HIV AIDS, sebenarnya adalah problem utama akibat kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dan ketidak berdayaan dalam sektor agama. “Pemahaman tentang agama yang masih sangat rendah sehingga menganggap kehidupan bebas itu sesuatu yang sah-sah saja,” ungkap Ali.

Karena itulah dalam hal pemahaman agama negara harus masuk, sehingga bisa dibangun kesadaran dan keyakinan dan pemahaman kembali pada perjalanan kebenaran. (spy)

foto: [andri/parle/od](#)

Presiden Joko Widodo Buka Konferensi Parlemen Asia Afrika

Presiden Joko Widodo membuka Konferensi Parlemen Asia-Afrika di Gedung Nusantara, DPR pada Kamis pagi. Konferensi ini diselenggarakan guna memperkuat peran lembaga perwakilan rakyat di kawasan tersebut.

“Saya menyambut gembira dan mengapresiasi inisiatif DPR RI untuk mengadakan Konferensi Parlemen Asia-Afrika pada 23 April 2015,” kata Presiden Jokowi dalam pidato pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (23/4/2015).

Menurut Presiden, Indonesia memperoleh penghargaan luar biasa karena telah menjadi tuan rumah berbagai peristiwa bersejarah tingkat dunia.

Dalam pidatonya, Jokowi mengatakan tema dalam konferensi parlemen; “Memperkuat Peran Parlemen dalam Kerja Sama Selatan-Selatan untuk Mempromosikan Perdamaian dan Kesejahteraan Dunia” sejalan dengan keinginan pemerintah untuk melakukan kontekstualisasi nilai-nilai utama Konferensi Asia-Afrika.

“Negara-negara Asia-Afrika kini dituntut untuk melakukan kontekstualisasi dan nilai utama yang dulu diperjuangkan oleh para pendahulu pada 60 tahun yang lalu yaitu kes-



Presiden RI Joko Widodo memukul gong, membuka Konferensi Parlemen Asia Afrika

ejjahteraan, solidaritas, dan stabilitas,” ujar Jokowi.

Dalam pertemuan itu, akan dibahas sejumlah isu di antaranya kerja sama dalam mempromosikan agenda pembangunan pasca-2015, Kemitraan Strategis Asia-Afrika Baru (NAASP), pengakuan terhadap Palestina.

Sejumlah pejabat negara yang akan menyampaikan pidato dalam pertemuan di antaranya Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen Nurhayati Ali Assegaf, Ketua DPR Setya Novanto, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua DPR Bidang

Politik dan Keamanan Fadli Zon, serta Wakil Ketua DPR Bidang Kesejahteraan Rakyat Fachri Hamzah.

Konferensi tersebut juga akan mengadopsi Deklarasi Parlemen Asia-Afrika. Konferensi Parlemen Asia Afrika ini dihadiri oleh delegasi parlemen dari 33 negara.

Hadir dalam acara pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika mantan Wapres Try Sutrisno, mantan Ketua DPR Akbar Tandjung dan Marzuki Ali, kepala lembaga negara, dan menteri-menteri kabinet kerja. (sc) foto: iwan armanias/parle/od

AAPC, Ada Seremoni Ada Aksi



Anggota BKSAP Hamdani

Pelaksanaan Asian African Parliamentary Conference (AAPC) sebagai bagian dari peringatan 60 tahun Konferensi Asia Africa dinilai cukup berhasil. Harapan publik agar kegiatan ini jangan hanya sekedar seremoni dinilai sebagai masukan positif untuk mendorong peserta konferensi bekerja optimal.

“Kegiatan ini tentu ada aspek seremoni, kita harus akui. Namun secara umum parlemen dari 33 negara yang hadir telah berhasil menyepakati deklarasi yang berisi aksi nyata dalam kerangka ingin mewujudkan perdamaian, kesejahteraan dan keadilan di dua kawasan ini,” kata anggota BKSAP Hamdani usai konferensi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4/15).

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini juga mengapresiasi pidato yang disampaikan pembicara kunci yaitu mantan presiden SBY yang saat ini menjabat *Chair of Gobar Green Growth Institute*. Ia mengamini tantangan dua benua yang penduduknya terpadat di dunia ini adalah masalah kesehatan, pendidikan dan kemiskinan.

“Kawasan Asia-Afrika memang mempunyai keterbatasan diantaranya dari sisi finansial tetapi dengan kerja sama misalnya pertukaran expert di bidang kesehatan dan pendidikan, sejumlah kendala saya rasa bisa diatasi,” papar wakil rakyat dari dapil Kalteng ini.

Pada bagian lain ia menyebut kesepakatan pembentukan

Asian African Parliamentary Group (AAPG) akan mendorong kesinambungan kerja sama negara dua kawasan ini. Penunjukan Indonesia sebagai sekretariat AAPG menurutnya adalah kepercayaan atas peran DPR dalam dinamika diplomasi parlemen Internasional. (iky)foto: naefuroji/parle/od

Konferensi Antar Parlemen Momentum Tingkatkan Perdamaian dan Kesejahteraan

Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron menyatakan bahwa Konferensi Asia Afrika yang baru digelar pertama kalinya ini, menjadi momentum baik untuk kerjasama meningkatkan perdamaian dan kesejahteraan. Hal ini pun untuk mewujudkan cita-cita Konferensi Asia Afrika pertama, tahun 1955.

“Saya kira Kerjasama Parlemen Asia Afrika ini menjadi momentum yang digagas baik, dan melanjutkan cita-cita pendahulu tahun 1955. Kita bisa ambil hikmah bahwa sesungguhnya kerjasama ini penting, dalam meningkatkan penyelesaian konflik, ataupun peningkatan kesejahteraan rakyat masing-masing negara,” kata Herman, usai acara pembukaan Konferensi Parlemen Asia Afrika, di Gedung Nusantara, Kamis (23/04/15).

Selain itu, tambah Politisi Demokrat ini, pentingnya konferensi dan kerjasama Parlemen Asia Afrika ini karena sebagian besar negara di Afrika, belum terlepas dari kemiskinan dan konflik. Jika berkaca dengan perjalanan Bangsa Indonesia, ia mengambil pengalaman bagaimana Bangsa Indone-



Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron

sia menyelesaikan konflik dengan baik, baik di internal Indonesia, maupun Indonesia dengan Timor Leste.

“Saya kira dua hal pokok utama yang harus kita capai, yaitu perdamaian dan kesejahteraan. Ditambah kerjasama, tentunya di bidang ilmu, teknologi, saling memberi, dan saling menolong,

untuk meningkatkan masing-masing kompetensi negara,” harap Herman.

Politisi asal Dapil Jawa Barat VIII ini menjelaskan, masing-masing negara memiliki kompetensinya masing-masing. Sehingga, dengan adanya kerjasama ini untuk kolaborasi antar negara, saling mengisi dan saling memberi antar negara.

“Tujuan dari Konferensi Asia Afrika (KAA), yang saat ini menjadi tema pokoknya adalah Kerjasama Selatan-Selatan untuk menyelesaikan konflik dengan perdamaian dan kesejahteraan, ini saya rasa harus menjadi *mind-set* kita untuk kerjasama ini,” imbuh Herman.

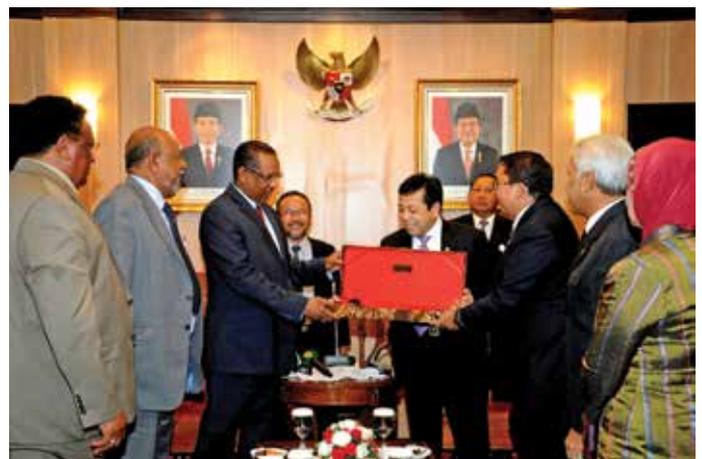
Herman yakin, jika Pemerintah sudah menjalin kerjasama yang sudah dijalin selama 60 tahun melalui KAA, ditunjang gagasan membentuk Konferensi Parlemen yang pertama kali, gerakan ini kedepannya dapat ditindaklanjuti dengan kerjasama yang lebih efektif, saling menguntungkan, dan apa yang menjadi tujuan perdamaian itu bisa tercapai,” harapnya. (sf) foto: rizka/parle/od

DPR Harapkan Sudan Dukung Deklarasi Konferensi Parlemen AA

Ketua DPR Setya Novanto menyampaikan terima kasih kepada Parlemen Sudan atas kehadiran dan dukungannya sehingga pelaksanaan Konferensi Parlemen dalam rangka Peringatan 60 tahun Konferensi Asia Afrika berjalan lancar. Termasuk dukungan Sudan terhadap Deklarasi yang dihasilkan Konferensi.

Harapan tersebut disampaikan Novanto yang didampingi Wakil-wakil Ketua Fadli Zon dan Agus Hermanto serta Pimpinan BKSAP dan Wakil Ketua Komisi VII DPR serta Sekjen DPR Winantuningtyastiti ketika menerima Delegasi Parlemen Sudan dipimpin Ketuanya Al-Fateh Izzeldin Al-Mansour di Ruang Kerja Lantai III Gedung Nusantara III, Rabu (22/4).

Pada kesempatan ini Ketua DPR menyampaikan ucapan selamat kepada Pemerintah dan rakyat Sudan yang baru saja



Pimpinan DPR RI menerima cinderamata dari Ketua Parlemen Sudan

sukses menyelenggarakan pemilihan umum dengan aman dan damai. Hubungan baik Indonesia-Sudan selama ini telah terjalin dengan baik, bahkan sebelum Indonesia merdeka.

“Kedua negara juga kedua parlemen telah memiliki forum konsultasi bilateral untuk memperkuat hubungan kerja sama di berbagai bidang,” katanya.

Sebagai salah satu negara penghasil minyak terbesar di dunia, Ketua DPR menyambut baik jika ada keinginan Sudan untuk bekerja sama dengan Indonesia di bidang ini. Menanggapi usulan tersebut, Ketua Parlemen Sudan menyatakan akan menyampaikannya kepada pemerintah Sudan. Kerja sama tersebut selain masalah sandang, pangan juga kebutuhan pokok lainnya sebab negeri di wilayah Afrika menilai

Indonesia lebih berpengalaman.

Sebagai negara muslim, kata Al-Fateh, kalau sebelumnya umat Islam hanya ada satu problem yaitu perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina, kini makin bertambah dengan adanya konflik yang terjadi di negara Islam. “Kita semua dituntut untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi umat Islam tersebut,” ungkap Fateh dengan mengatakan, Parlemen Sudan mengundang DPR untuk bisa mengirim Delegasi mengunjungi negara yang merupakan pintu gerbang masuk Afrika tersebut. (mp) foto: iwan armanias/parle/jod

Terima Kasih Indonesia



Pimpinan DPR RI didampingi Ketua Delegasi Parlemen Palestina

Dalam konferensi pers usai pelaksanaan *Asian African Parliamentary Conference (AAPC)* di Pustakaloka, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/4), Ketua DPR RI Setya Novanto secara khusus mempersilahkan Ketua Delegasi Palestina Abdullah M. I. Abdullah menyampaikan pernyataan. Peluang itu digunakannya untuk menyapa rakyat Indonesia melalui media.

“Ini kesempatan baik melalui media

yang hadir disini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap rakyat Indonesia yang telah memberikan dukungan tiada henti bagi upaya mewujudkan kemerdekaan Palestina,” kata Abdullah yang berdiri diapit Pimpinan DPR dan Ketua BKSAP.

Ia juga mengharapkan dukungan lanjutan dari rakyat dan Pemerintah Indonesia untuk membuka secara resmi kantor perwakilan di Palestina.

Kepada Ketua DPR ia juga menyampaikan undangan resmi dari Ketua Parlemen Palestina untuk berkunjung ke negaranya sebagai upaya lebih menguatkan hubungan diantara rakyat dua negara.

Abdullah secara khusus menyampaikan saat ini sejumlah warga Indonesia telah melakukan kunjungan ziarah ke mesjid Al Aqsa. Ia mengundang lebih banyak peziarah untuk datang sebagai bentuk dukungan dan penguatan hubungan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyambut baik ajakan tersebut dan berjanji mempelajarinya. “Kenapa tidak, nanti Ketua DPR akan mempertimbangkan secara serius untuk mengirimkan delegasi berkunjung kesana,” tutur dia.

Agenda khusus ‘*Recognition to Palestine*’ dalam acara AAPC adalah bentuk konsistensi dukungan politik DPR kepada negara yang termasuk paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia. Delegasi DPR tercatat juga sudah beberapa kali berkunjung bahkan ke lokasi konflik Gaza, sebagai bentuk dukungan politik yang konkrit. (iky)/ foto:iwan armanias/parle/iw.

DPR Apresiasi Langkah MER-C

Pimpinan DPR mengapresiasi dan mendukung langkah MER-C (*Medical Emergency Rescue- Committee*) yang telah berhasil mendirikan rumah sakit dan *Cardiac center* di Jalur Gaza, Palestina. Hal tersebut terungkap ketika Ketua DPR RI, Setya Novanto yang didampingi Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Fahri Hamzah menerima Presidium MER-C, Senin (20/4) di ruang kerjanya di Senayan Jakarta.

“Kami mengapresiasi dan sangat mendukung langkah MER-C yang telah mendirikan RS dan *Cardiac center* di Jalur Gaza, Palestina. Tentu Pemerintah harus juga mendukung MER-C, karena sebagaimana yang diungkapkan oleh teman-teman dari MER-C tadi, sejauh ini pendirian rumah sakit itu berasal dari dana yang dikumpulkan masyarakat Indonesia selama beberapa tahun,” ujar Novanto dalam pertemuan itu.



Ketua DPR RI Setya Novanto menerima Presidium MER-C



Pada kesempatan itu Novanto juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus mendukung langkah MER-C tersebut, salah satunya dengan memberi dorongan kepada pemerintah menganggarkan sejumlah dana pada tahun mendatang. Hal tersebut menjadi sebuah langkah konkrit pemerintah Indonesia untuk terus mendukung kebebasan bangsa Palestina sebagaimana salah satu janji dalam kampanyenya 2014 lalu.

“Jika mendatang pemerintah menganggarkan sejumlah dana untuk program kemanusiaan bagi rakyat Palestina ini, tentu DPR akan menyetujuinya,” tegas Novanto.

Sementara itu, salah satu Presidium MER-C, Joserizal Jurnalis mengatakan bahwa pihaknya mendirikan rumah sakit yang dinamakan RS Indonesia-Gaza (sebelumnya bernama RS Al Shifa) di Gaza, Palestina murni berasal dari dana masyarakat Indonesia. Dan tidak ada satu rupiah pun yang berasal dari Pemerintah Indonesia. Padahal sebelumnya pemerintah berjanji akan memberikan bantuan dana sebe-

sar 20 Miliar, namun hingga hari itu dana tersebut belum juga dikucurkan.

“Kedatangan kami ke DPR ini untuk melaporkan, bahwa kami sudah selesai membangun rumah sakit dan *cardiac center* di Gaza Palestina yang tentu membawa nama bangsa Indonesia. Kami menunggu arahan apa yang harus kami lakukan selanjutnya. Apa Pemerintah Indonesia akan mendukung ke depannya atau tidak. Karena sebenarnya yang kami lakukan ini sebagai *Humanitarian approach diplomacy* atau diplomasi pendekatan kemanusiaan. Kami menjembatani pemerintah yang mengalami kekagokan ketika harus mendukung Palestina secara langsung. Dana yang kami kumpulkan untuk membangun satu rumah sakit dan *cardiac center* ini murni berasal dari masyarakat Indonesia, dan tidak ada satu sen pun dana dari pemerintah. Sebelumnya pemerintah memang menjanjikan akan memberikan dana 20 Miliar tapi sampai hari ini belum juga kami terima,” papar Joserizal. (Ayu) foto: *denus/parle/od*



Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang kesejahteraan rakyat, Fahri Hamzah berharap pemerintah membuktikan janji politiknya yang akan terus mendukung bangsa Palestina dalam mewujudkan kemerdekaannya. Hal itu diungkapkannya saat menerima Presidium MER-C (*Medical Emergency Rescue Committee*), Senin (20/4) di ruang kerja pimpinan DPR RI, Senayan Jakarta.

Pemerintah Harus Buktikan Janji Politik Dukung Palestina

“Presiden dan Wapres secara lisan dalam kampanyenya berjanji akan terus mendukung Palestina seperti membuka Kedutaan Besar Indonesia di Palestina. Namun karena Ramallah yang merupakan ibukota Palestina masih diduduki oleh Israel sehingga pemerintah belum bisa mewujudkan janjinya tersebut. Kami berharap ada upaya konkrit lain dari pemerintah untuk mewujudkan janji politiknya,” ungkap Fahri.

Selain itu dikatakan Fahri, pemerintah Indonesia harus memberi dukungan kepada bangsa Palestina sebagai komitmen pendiri bangsa Indonesia terdahulu. Terlebih lagi saat ini ada blokade terhadap Palestina khususnya di Gaza. Sehingga Palestina tidak memiliki kebebasan membangun dirinya.

Oleh karena itu akan ada desakan yang kuat terhadap Israel dan negara-negara pendukungnya supaya blokade itu dibuka secepatnya. Supaya Palestina merdeka, dan dapat berhubungan dengan negara-negara lain terutama hubungan dagang.

“Secara khusus saya berharap Bandara di Gaza dapat dibuka kembali dan menjadi kota internasional, supaya negara-negara lain melihat pulau yang sudah berusia ribuan tahun ini. Oleh karena itu Gaza harus dibangun infrastruktur yang baik,” paparnya sambil mengingatkan bahwa isu Palestina ini akan disampaikan pada sesi tersendiri dalam Konferensi Asia-Afrika di DPR yang akan digelar pada 23 April mendatang. (Ayu) foto: *denus/parle/od*

Indonesia dan Filipina Bisa Ambil Manfaat Pemberlakuan MEA

Ketua DPR Setya Novanto mengharapkan kehadiran dan penugasan Maria Lumen B. Isleta sebagai Dubes Filipina untuk Indonesia dapat meningkatkan hubungan bilateral kedua

negara.

Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan Dubes Maria Lumen di ruang kerjanya Lantai III Gedung Nusantara III Senayan, Senin (20/4). Didampingi

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, Wakil Ketua BKSAP DPR Meutya Hafid dan Marinus Gea serta Sekjen DPR Winantuningtyastiti, Ketua DPR lebih lanjut menyambut baik berbagai bentuk kerja



Pimpinan dan Anggota DPR RI menerima Dubes Filipina

sama yang sudah dicapai kedua negara.

“Seperti kesepakatan batas wilayah laut di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), dan kesepakatan pembelian pesawat N2 12i produksi PT Dirgantara Indonesia oleh Filipina,” ungkapnya.

Ke depan, kata Setya Novanto, kedua negara perlu bergerak meningkatkan kerja sama terutama kerja sama ekonomi perdagangan khususnya menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) di akhir tahun ini. Dia juga berharap kedua negara dapat mengambil manfaat yang sebesar-besarnya pemberlakuan MEA.

Kepada Dubes Maria Lumen, Ketua DPR juga menyatakan bahwa Indonesia dapat belajar dari Filipina dalam hal pengelolaan pengiriman dan perlindungan buruh migran di luar negeri. (mp)

foto: iwan armanias/parle/od

Terbakarnya Pesawat F-16 Jadi Momen Evaluasi



Pimpinan DPR RI menerima KaSAU

Pimpinan DPR mengundang Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Madya Agus Supriatna untuk meminta klarifikasi mengenai tragedi terbakarnya salah satu pesawat F-16 milik TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (16/4/15) pukul 08.20 WIB.

Seperti diinformasikan di berbagai media, sedianya, pesawat jet tempur dengan nomor ekor TS-1643 ini akan melakukan misi Fly Pass dalam rangka pembaretan Presiden Jokowi sebagai warga kehormatan TNI. Namun sayangnya, tiba-tiba mesin jet meledak saat hendak tinggal landas di landasan 6 dan membakar sebagian badan pesawat.

“Kemarin saya hadir pada acara pembaretan Presiden. KaSAU sudah menjelaskan apa yang telah terjadi kemarin. Kami apresiasi KaSAU sudah menjelaskan secara jelas. Ini

tentunya demi kepentingan bangsa dan negara ke depannya, dan program ke depannya,” jelas Ketua DPR Setya Novanto (F-PG), mengawali konferensi pers kepada awak media, di Gedung Nusantara III, Jumat (17/04/15). Novanto didampingi Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Sementara Fadli menyatakan, DPR menginginkan alutsista udara yang dimiliki TNI AU memiliki kualitas yang terbaik. Ia menilai, dengan kejadian terbakarnya pesawat ini, adalah waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi dan evaluasi.

“Jika ada pengadaan (pesawat) seperti itu, ini juga moment untuk melakukan evaluasi, apakah ini efektif yang kita lakukan kemarin, sehingga ke depannya tidak terjadi lagi. Ini momentum untuk melakukan evaluasi,” tambah Politisi F-Gerindra ini.

Agus menjelaskan, dengan adanya peristiwa ini, pesawat F-16 yang lain untuk sementara tidak diterbangkan karena sedang dilakukan evaluasi menyeluruh. Pihak Amerika Serikat pun sudah diberitahu soal kebakaran yang terjadi.

“Untuk sementara waktu, yang ada di sini akan kita evaluasi. Kami pun sudah memberi berita kepada pihak Amerika Serikat. Untuk pesawat yang sudah ada di Amerika, akan dicek sebelum diberangkatkan ke Indonesia,” jelas Agus.

Agus mengakui, beberapa pesawat yang dikirim Amerika Serikat pada TNI AU memang ada yang mengalami kerusakan. Namun, dia memastikan jika kerusakan yang terjadi hanya retak di bagian kanopi dan tidak ada kerusakan yang dialami mesinnya.

“Memang ada retak tapi itu di bagian kanopi, bukan di mesin. Alhamdulillah, pada bulan Juni nanti, pesawat kita lainnya akan dipasang *drag chute*. Ini sangat menolong sekali jika pesawat gagal *take off*,” pungkasnya. (sf) foto: andri/parle/od

Pimpinan DPR Berharap Polri Solid dan Makin Baik



Pelantikan Kapolri Badroddin Haiti di Istana Negara

Pimpinan DPR mengharapkan dengan dilantikannya Badroddin Haiti oleh Presiden secara *de facto* dan *de jure* maka telah resmi sebagai Kapolri. Rekam jejak Badroddin Haiti tidak bisa dibantah lagi memang putra terbaik kepolisian dan sudah mendapat Adimakayasa. “Tentu kita harapkan kepolisian akan menjadi solid dan semakin baik,” kata Ketua DPR Setya Novanto usai

menghadiri pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (17/4) pagi.

Selanjutnya Novanto berharap, Badroddin Haiti akan melakukan koordinasi dengan KPK dan Kejaksaan, sehingga ketiga lembaga penegak hukum itu menjadi makin kuat

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyampaikan harapan yang sama, ke depan untuk membina dan men-

jaga hubungan baik dengan DPR. “Selama ini Badroddin Haiti selalu menjaga hubungan baik antara DPR dengan Polri. Sebagai Kapolri baru, hubungan ini tetap terjaga dan terus akan terjaga,” terang dia.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengemukakan, pelantikan Kapolri memang sudah waktunya karena sudah berbulan-bulan tidak mempunyai Kapolri. Dengan adanya Kapolri baru, dia harapkan institusi polri sudah bisa bergerak dengan cepat untuk melakukan penataan.

Menurutnya, Kapolri Badroddin Haiti adalah figur yang mempunyai integritas, kapasitas, kapabilitas yang bisa membawa polri yang lebih baik. Polri juga diharapkan bisa menjadi institusi yang lebih baik, bisa melayani rakyat dan menjaga kepentingan nasional, dan bangsa di atas kepentingan yang lain.

Apalagi lanjutnya, sekarang akan menghadapi Peringatan Konferensi Asia Afrika yang ke 60 dimana 76 Kepala Negara akan hadir. Kehadiran Kapolri dinilai sangat dibutuhkan, apalagi DPR akan mendatangkan Ketua Parlemen dari 27 negara sehingga perlu pengamanan yang solid. (spy/mp) foto: rizka/parle/hr

Kurtubi: Harga Pertalite Harusnya Dekati Premium

Anggota Komisi VII DPR Kurtubi menyerukan agar harga produk baru BBM bernama pertalite mendekati harga premium, bukan pertamax. Dengan penetapan harga mendekati premium, masyarakat justru diuntungkan dengan kualitas BBM yang baik dan tidak merusak mesin kendaraan.

Hal tersebut disampaikan Kurtubi (dapil NTB), Selasa (21/4), menanggapi rencana Pertamina meluncurkan pertalite pada Mei 2015 nanti. Menurut Kurtubi, dengan diluncurkannya pertalite (ron 90) tidak harus serta merta menghapus premium (ron 88) dari pasaran. Dengan begitu, masyarakat punya banyak pilihan dengan kualitas BBM yang berbeda-beda.

“Kalau pertalite (ron 90) harganya mendekati pertamax, maka sedikit sekali orang yang mau menggunakan ron 90. Tetapi saya himbau kepada

pemerintah dan Pertamina, sebaiknya penetapan harga ron 90 ini mendekati premium. Jangan ditempatkan di tengah, antara premium dan pertamax. Ini untuk mendorong rakyat menggunakan bensin yang berkualitas, sehingga mesin kendaraannya bisa lebih awet,” kata politisi Partai Nasdem itu.

Pemerintah sendiri secara bertahap menggeser pasar premium hanya untuk angkutan umum. Menurut Kurtubi, sebaiknya premium memang tidak dihilangkan sama sekali. Bila ada angkutan umum yang tidak suka dengan pertalite, mereka bisa tetap memilih premium. Tapi yang lebih penting lagi, lanjut Kurtubi, konversi BBM ke BBG mesti lebih cepat dilakukan.

“Pengalihan BBM ke BBG penting untuk angkutan umum. Jadi stasiun BBG-nya segera diperbanyak juga *converter kit* dan bengkelnya. Beberapa



Anggota Komisi VII DPR Kurtubi

stasiun BBG memang sudah dibangun, tapi tidak ada kendaraan yang beli gas, karena tidak dibagikan *converter kit*nya. Pemerintah masih separuh-separuh melakukan konversi. Angkutan umum kalau pakai gas jauh lebih bagus. Dalam artian pendapatannya akan lebih meningkat karena gas lebih murah dari pada premium meskipun gas tidak disubsidi,” jelas Kurtubi. (mh) foto: andri/parle/hr

Pembekuan PSSI Salah Alamat dan Keablasan

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam menilai, pembekuan PSSI oleh Menpora, keablasan dan salah alamat. Pimpinan Komisi X dari FPG ini mengatakan, pembekuan itu tidak pada tempatnya, sebab fungsi Kemenpora dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) dalam rangka pembinaan organisasi kepemudaan olahraga, tidak sampai melakukan sanksi seperti itu.

“Saya lihat PSSI berlebihan dan salah alamat. Kalau terkait surat peringatan kesatu, kedua hingga ketiga, kan bukan PSSI yang bersalah. Itu masalah sepakbola profesional, pelaksanaannya PT Liga Indonesia. PSSI itu banyak urusannya, ada liga, ada badan Timnas, PSSI Usia 23 dan lain-lain. Perlu dipertanyakan bagaimana PSSI sebagai induk organisasi dimatikan,” jelasnya sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Selasa (21/4) sore.

Sebagai solusinya, Politisi Golkar dari Dapil Malang Raya Jatim ini menegaskan, Komisi X telah menyampaikan



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam

undangan kepada Menpora untuk menggelar Raker. Namun karena kesibukan menjelang KAA, maka tidak bisa memenuhi undangan DPR, sehingga akan dijadwal ulang.

Saat ditanyakan apakah bisa segera selesai kisruh ini, Ridwan menegaskan tergantung Menpora. “Seharusnya kalau hanya menyangkut soal dua klub, ya dua klub ini saja yang difokuskan penyelesaiannya. Jangan keseluruhan organisasinya,” tukas dia.

Dia menambahkan, PSSI sudah datang ke DPR Senin lalu dan semua permasalahan telah dijelaskan, termasuk dua klub yang dilarang kompetisi ISL. PSSI juga minta dukungan Komisi X untuk klub-klub sepakbola yang dilarang bisa ikut main dan diputuskan, kompetisi akan dimulai lagi tanggal 26 April dan Divisi Utama dimulai tanggal 30 April.

Komisi X tandas Ridwan Hisyam, mendukung langkah-langkah PSSI untuk menyelesaikan masalahnya dengan Menpora dan Komisi X DPR berpegang pada rekomendasi Pakta Integritas yang sudah ditandatangani oleh klub PSSI disaksikan BOPI, PT Liga Indonesia dan Komisi X, bahwa kompetisi diikuti oleh 18 klub, kalau ada klub yang belum lengkap dilengkapi hingga akhir putaran I.

“Jadi kalau dalam 4 bulan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur PSSI maka dikasih sanksi tidak boleh ikut kompetisi. Itu yang kita pegang tanggal 26 Maret lalu. Selama keputusan itu belum ditarik, kita masih memegang keputusan tersebut. Pihak-pihak terkait termasuk BOPI harus komit terhadap kesepakatan tersebut,” terang Ridwan Hisyam. (mp)

foto: naefuroji/parle/od

Paripurna DPR Setujui Erwin Riyanto Jadi Deputi Gubernur BI

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Selasa (21/4) sore menyetujui Erwin Riyanto sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Erwin mengalahkan dua kandidat lainnya yaitu Dody Budi Waluyo dan Hendy Susilowati yang diuji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi XI sehari sebelumnya.

Dengan persetujuan tersebut, Erwin Riyanto sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Departemen Surveillance Sistem Keuangan BI akan menggantikan posisi Deputi Gubernur BI Halim Alamsyah yang masa jabatan akan berakhir pada 1 Juni 2015.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad melaporkan jalannya uji kepatutan dan kelayakan Deputi Gubernur BI atas ketiga calon tersebut. Dalam rangka mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel, Komisi XI telah menggelar RDP dengan PPAK. Selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan system pengambilan keputusan melalui pemungutan suara (voting).

Dalam voting yang dilakukan Komisi XI, Dody Budi Waluyo memperoleh 5 suara, Erwin Riyanto unggul mutlak memperoleh 42 suara dan Hendy Susilowati mendapatkan 2 suara. Dalam voting tersebut terdapat 4 suara yang tidak sah. (mp) foto: naefuroji/parle/od



Pimpinan DPR RI dan Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih Erwin Riyanto



Baleg Akan Giatkan Sosialisasi UU



Pimpinan Baleg DPR dengan Gubernur Kalsel

Badan Legislasi (Baleg) DPR-RI berencana akan semakin menggiatkan sosialisasi Undang-undang (UU), yakni Rancangan Undang-undang yang sedang dalam penyusunan, maupun RUU yang sudah diundangkan. Pasalnya, UU yang dihasilkan DPR dan Pemerintah Pusat, nantinya akan menjadi payung hukum bagi masyarakat.

Demikian dikatakan Ketua Baleg Sareh Wiyono, usai pertemuan dengan Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran, di Aula Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (20/04). Kunker ini dalam rangka sosialisasi Prolegnas Tahun 2015-2019.

“Kunjungan ini sangat bagus sekali. Dengan adanya sosialisasi ini, sehingga kita banyak mendapatkan masukan dari daerah untuk UU yang masuk Prioritas Prolegnas dan sedang diharmonisasikan. Ini sangat baik bagi Baleg, sehingga bila perlu ditingkatkan ke daerah-daerah lain,” jelas Sareh.

Politisi Gerindra ini menyambut positif seluruh masukan dan aspirasi daerah dari Pemerintah Provinsi Kalsel, maupun *stakeholder* di Kalsel. Dalam kunker ini, pembahasan fokus pada RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah,

dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Masukan itu sangat positif, seperti masalah tambang atau dana perimbangan, yang saat ini sedang kita kerjakan. Kita betul-betul minta masukan dari daerah, terutama daerah penghasil. Jika mereka tidak setuju, mereka dapat menyampaikan aspirasinya kepada DPR, berupa naskah akademik,” tambah Sareh.

Politisi asal Dapil Jawa Timur VIII ini menambahkan, bila diperlukan, Baleg akan mengundang Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pemerintah Provinsi atau jajaran, untuk menyampaikan aspirasi mengenai RUU yang sedang dibahas.

“Sekali waktu Gubernur maupun jajaran, bisa kita undang RDPU, untuk menyampaikan masukannya. Sehingga, UU yang dihasilkan nanti tidak hanya sekedar kepentingan DPR ataupun Pemerintah, tapi menjadi payung hukum untuk seluruh masyarakat,” tambah Sareh.

Politisi yang juga Anggota Komisi III ini menegaskan bahwa kunker ini merupakan sosialisasi yang pertama. Selain ke Provinsi Kalsel, tim juga disebar ke Provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. “Ke depannya mungkin juga kita akan menambah ke daerah timur dan daerah-daerah lainnya untuk melakukan sosialisasi,” tutup Sareh. (sf) foto: sofyan/parle/od

Baleg Apresiasi Masukan dari Pemprov Kalsel

Badan Legislasi DPR mengapresiasi masukan dan aspirasi dari Gubernur Kalimantan Selatan dan jajaran mengenai Rancangan Undang-undang yang saat ini masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional tahun 2015. Aspirasi ini menjadi masukan yang berharga untuk Baleg.

Demikian disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Baleg ke Provinsi Kalsel, Firman Subagyo usai pertemuan dengan Gubernur Kalsel dan jajaran, di Aula Aberani Sulaiman, Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru, Senin (20/04/15). Kunker ini dalam rangka sosialisasi Prolegnas Tahun 2015-2019.

“Dari sosialisasi ini, tentunya ini menjadi awal yang cukup bagus. Karena kami memerlukan banyak masukan, apalagi yang termasuk dalam mineral dan batu bara. Apa yang tadi disampaikan Gubernur, akan memperkaya materi dari Baleg untuk melakukan harmonisasi. Diharapkan ada masukan tertulis dari Pemerintah Provinsi maupun *stakeholder*

lainnya, bahwa ada kepentingan yang harus diakomodir, termasuk dana bagi hasil dan lain sebagainya,” jelas Firman.

Dalam kunker ini, Baleg memfokuskan penyerapan masukan mengenai RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, dan RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Politisi F-PG ini menambahkan, revisi UU Nomor 33 Tahun 2004 adalah revisi usulan pemerintah. Oleh karena itu, jika Pemerintah dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tidak memasukkan apa yang menjadi aspirasi daerah, maka DPR mempunyai otoritas untuk memasukkannya, saat pembahasan Panitia Kerja (Panja),

“Kami akan berusaha semaksimal mungkin akomodir masukan dari daerah, karena yang kami hadapi dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat. Dimana pembahasan penyusu-



Pimpinan Baleg DPR RI sedang mendengarkan masukan dari Pemprov. Kalsel

nan dari RUU menjadi UU tidak menjadi hak absolut DPR, namun juga bersama Pemerintah, itu yang menyulitkan kami. Kami akan melakukan negosiasi dengan pemerintah, apa kira-kira yang menjadi solusi dari permintaan daerah ini,” kata Firman.

Politisi asal Dapil Jawa Tengah III ini mengakui, selama ini dalam pembahasan UU di Panja sangat terbatas waktunya, sehingga kurang melibatkan aspirasi dari daerah. Biasanya, Panja hanya melibatkan akademisi dan perguruan tinggi.

“Kami katakan kepada Gubernur Kalsel, ini bukan pertemuan yang terakhir, tapi kita akan melakukan pertemuan berikutnya di Jakarta. Gubernur dan masyarakat bisa menyampaikan masukan kepada DPR RI. Saya rasa ini sangat bagus, karena memang dalam proses penyusunan UU jarang itu melibatkan daerah. Kami ke Kalsel ini jemput bola, jangan sampai RUU yang diundangkan itu banyak menimbulkan kekecewaan di masyarakat,” jelas Firman.

Sosialisasi ini, imbuh Firman, merupakan kegiatan Baleg untuk pertama kalinya. Ia menjelaskan, hal ini berdasarkan amanat UU MD3, bahwa dalam proses penyusunan suatu RUU menjadi UU, perlu disosialisasikan kepada publik. Karena UU itu nantinya akan menjadi payung hukum, dimana itu

harus memenuhi hak-hak masyarakat dan sebesar-besarnya untuk masyarakat, bangsa dan negara.

“Ini terobosan baru, dimana Baleg mempunyai otoritas untuk melakukan sosialisasi, baik RUU maupun UU yang masuk skala Prioritas dalam Prolegnas, maupun saat pembahasannya. Termasuk setelah RUU itu diundangkan, maka ada kewajiban dari Baleg untuk melakukan sosialisasi,” jelas Firman.

Sebelumnya, Gubernur Kalsel Rudy Ariffin mempertanyakan kecilnya presentase pembagian royalti sumber daya alam yang diterima daerah penghasil, seperti daerah yang dipimpinnya. Ia menilai, selama ini belum ada keadilan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah, khususnya sektor penerimaan pajak dan royalti tambang.

“Yang dipungut dari miliaran atau triliunan rupiah ekspor batubara sebesar 13,5 persen. Sebagian besar dipungut pemerintah pusat, Kalsel hanya mendapat 3 persen dari 13,5 persen itu. Itu juga harus dibagi lagi dengan Kabupaten atau Kota di Kalsel. Dari 3 persen itu, Provinsi hanya mendapat 40 persen dan sisanya dibagi ke seluruh kabupaten atau kota. Sangat tidak adil, karena yang merasakan degradasi lingkungan adalah daerah penghasil,” tegas Rudy.

Untuk itu, ia mengaku lebih memilih wilayah yang dia pimpin tidak memiliki tambang batu bara dari pada harus menanggung risiko kerusakan alam yang luar biasa seperti saat ini.

“Kalau disuruh memilih, saya lebih memilih Kalsel tidak memiliki tambang, tetapi tetap mendapatkan bagi hasil dari pusat, dari pada harus menanggung risiko kerusakan alam yang luar biasa seperti saat ini,” protes Rudy.

Kunker ini juga diikuti oleh Ketua Baleg Sareh Wiyono (F-PG), kemudian Anggota Baleg dari F-PDIP Hendrawan Supratikno, My Esti Wijayati, Daniel Lumban Tobing dan Rieke Diah Pitaloka. Dari F-PG mengirimkan Neni Moerniaeni dan Tabrani Maamun.

Kemudian, hadir pula Jefirstson Riwu Kore (F-PD), Ammy Amalia Fatma Surya (F-PAN), Abdul Fikri Faqih (F-PSK), dan Ali Umri (F-Nasdem). (sf) foto: sofyar/parle/od

DPR Dukung KBRI Yaman Pindah ke Lokasi Aman

Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyatakan dukungan atas keputusan pemerintah untuk segera memindahkan KBRI Yaman di Sanaa ke lokasi yang jauh dari lokasi konflik. Ia menyebut seharusnya langkah ini sudah dilakukan ketika mengetahui ada gudang senjata yang dikuasai kelompok bersenjata tidak jauh dari Gedung KBRI.

“Kita sudah berkomunikasi dengan Menlu, kita dukung sementara KBRI pindah ke wisma dan kemungkinan di-

geser lebih jauh. Masalahnya mengapa gudang amunisi yang sudah dikuasai kelompok militan tidak diketahui KBRI, ini yang perlu kita dalami,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/4/15).

Politisi Fraksi PDIP ini memastikan Gedung KBRI bukan menjadi target tembakan tetapi hanya terkena dampak dari serangan udara yang diarahkan ke gudang senjata. Komisi I menurutnya akan terus memonitor upaya membantu Warga Negara Indonesia yang masih



Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin



berada di Yaman agar dapat segera keluar dari lokasi perang tersebut.

Baginya dalam situasi perang tidak ada yang bisa dilakukan selain menjauh dari lokasi kontak tembak. Namun pemerintah dapat saja menyampaikan semacam nota kepada negara yang

tergabung dalam koalisi agar lebih berhati-hati karena serangannya telah membahayakan kawasan sipil.

Secara khusus purnawirawan TNI berbintang dua ini juga menyampaikan rasa apresiasi kepada para petugas dan diplomat KBRI yang masih melak-

sanakan tugas di lokasi konflik. “Kita menaruh rasa hormat dan apresiasi kepada para petugas, pejabat KBRI disana,” tekannya. (iky) foto: iwan armianas/parle/od

RUU Pertanahan Untuk Memperkuat UUPA



Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo mengatakan rancangan undang-undang pertanahan bukan untuk mengganti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tetapi ditujukan untuk memperkuat dan melengkapinya.

Hal itu disampaikan Arif saat menjadi pembicara dalam diskusi Forum Legislasi bertajuk RUU Pertanahan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (21/4). Selain Arif Wibowo, hadir menjadi pembicara Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan dan pengamat hukum Rahmat Bagdja.

“Ini bukan untuk mengganti UUPA tetapi untuk melengkapi yang sudah diatur dan memperkuatnya,” tegas Arif.

Politisi dari FPDIP itu menjelaskan RUU Pertanahan ini sudah disiapkan sejak lama sebagai inisiatif DPR. Menurut Arif, substansi tujuannya untuk memperkuat UUPA menyangkut hak-hak atas tanah.

“Meskipun sebenarnya secara prinsip hak-hak atas tanah sudah diatur. Tetapi dalam pelaksanaan tidak dijalankan dengan baik pada masa orde baru,” katanya.

Ia mengatakan pada masa Orde Baru tersebut justru banyak dikeluarkan UU yang sifatnya sektoral dimana substansinya justru mengeser nilai-nilai dalam UUPA. “Ini bukan untuk mengganti UUPA tetapi justru melengkapi yang sudah diatur,” ujarnya.

Arif mencontohkan soal pendaftaran atas tanah, sudah tidak cocok, yang sebelumnya menggunakan stelsel pasif, ke depan didorong stelsel aktif oleh pemerintah.

Selain itu soal penguasaan tanah, sampai seberapa luas yang seseorang diperbolehkan menguasai tanah. “Bolehkan orang menguasai dan memiliki tanah yang luasannya tak terbatas. Sementara banyak para petani yang hanya memiliki kurang dari setengah hektar,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan sepakat bahwa RUU Pertanahan ini memang ditujukan untuk memperkuat UUPA, karena kalau diubah-ubah akan justru tidak akan menyelesaikan.

“RUU Pertanahan ini juga menjadi koridor untuk lakukan harmonisasi dan sinkronisasi aturan dibidang pertanahan. Ini juga harus memperkuat,” kata Ferry. (nt/sc) foto: andri/parle/od

Menata Risalah Berbasis Teknologi

Risalah rapat merupakan instrumen penting dalam mendukung kegiatan rapat para wakil rakyat di DPR RI. Risalah rapat tidak bisa dipandang remeh. Ia menjadi bukti otentik atas dinamika berbagai rapat di gedung DPR. Karena begitu pentingnya, Biro Persidangan DPR perlu mempelajari seluk beluk penyusunan risalah secara modern ke Parlemen Filipina.

Risalah rapat merupakan bukti otentik yang menampilkan proses jalannya suatu pengambilan keputusan rapat. Risalah Rapat juga dapat menjadi bukti dalam persidangan *judicial review* di

Mahkamah Konstitusi. Ia juga bukan perkara sederhana, karena harus melibatkan kebersamaan dan koordinasi yang baik antarunit, yaitu unit penyelenggara rapat dengan unit penyusun risalah.

Kepala Biro Persidangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Helmi-zar, Senin (20/4) menjelaskan, untuk menghasilkan risalah rapat yang baik perlu dilakukan evaluasi internal, mengadopsi metode-metode penyusunan risalah, penggunaan teknologi, serta mendapatkan pembandingan dengan institusi lain yang sejenis. Par-

lemen Filipina adalah satu dari sekian banyak parlemen yang dinilai memiliki pengelolaan dan manajemen penyusunan risalah yang telah maju.

Setjen DPR perlu belajar pada negara tetangga itu yang telah menerapkan teknologi tinggi dalam penyusunan risalah rapat. Setjen DPR pun mengutus Biro Persidangan untuk mempelajari seluk beluk penyusunan risalah yang baik dan modern. Banyak yang dipelajari dari teknik penyusunan risalah di parlemen Filipina itu. Misalnya, delegasi Biro Persidangan mempelajari sistem penyusunan risalah, teknologi



Kepala Biro Persidangan Setjen DPR RI Helmizar dan jajaran diterima jajaran Sekretariat Parlemen Filipina

yang digunakan, dan SDM yang terlibat di balik penyusunan risalah.

Delegasi Biro Persidangan DPR yang dipimpin Helmizar diterima oleh Director General Antonio de Guzman Jr, Office of International Relation & Protocol dan Atty. Edwin B. Bellen, Deputy Secretary for Legislation pada 14-17 April lalu. Di Senat Filipina, risalah rapat menjadi tanggung jawab Deputy

Secretary for Legislation, khususnya bagian Legislative Debate Reporters Service dan Committee Support Service B. Risalah disusun dengan transparansi dan keakuratan.

Ada dua dokumen penting dalam setiap rapat di Senat Filipina. Record of Senate, yaitu laporan rapat yang dibuat secara persis kata demi kata sesuai dengan jalannya rapat atau ver-

batim (risalah rapat). Journal of Senate, yaitu laporan suatu rapat yang dibuat secara ringkas/summary (catatan rapat). Berbagai teknik penyusunan risalah dipelajari betul selama berada di parlemen Filipina.

Ada banyak pelajaran yang didapat selama mempelajari teknik penyusunan risalah rapat di Parlemen Filipina. Kuantitas dan kualitas SDM sangat memadai untuk menyusun risalah di Parlemen Filipina. Selain itu, tiap lembar risalah selalu dibubuhkan paraf dari editor atau direktur. Itu untuk menunjukkan akurasi penyusunan risalah. Ini menjadi “oleh-oleh” berharga selama menimba ilmu di Filipina.

Delegasi Biro Persidangan juga berkesempatan menemui Duta Besar RI untuk Filipina Johny J. Lumintang. Sang dubes bersedia membantu tim delegasi Biro Persidangan untuk mendapat berbagai informasi tambahan yang diperlukan, terutama seputar teknik penyusunan risalah dari senat dan Kongres Filipina. Sebelumnya, tim Biro Persidangan juga telah menyampaikan pertanyaan tertulis ke Parlemen Filipina untuk mendapat penjelasan yang lebih rinci dan menyeluruh. (mh) foto: dok./parle/od

Komisi XI Tetapkan Erwin Riyanto Jadi Deputy Gubernur BI

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga kandidat Deputy Gubernur Bank Indonesia oleh Komisi XI DPR akhirnya menyetujui Erwin Riyanto sebagai Deputy Gubernur Bank Indonesia menggantikan Halim Alamsyah yang masa jabatan akan berakhir pada 1 Juni 2015

Uji kelayakan dan kepatutan terhadap ketiga kandidat Deputy Gubernur Bank Indonesia dilakukan secara bergiliran dimulai sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka adalah Dody Budi Waluyo, Erwin Riyanto, dan Hendy Sulistyowati.

Pemilihan Calon Deputy Gubernur Bank Indonesia dilakukan melalui mekanisme voting tertutup, Erwin Riyanto memperoleh suara sebanyak 42 suara menyisihkan dua calon lainnya yakni Dody B. Waluyo yang mendapat lima suara dan Hendy Sulistyowati dan mendapat dua suara. Sedangkan suara tidak sah sebanyak 4 orang dari 53 anggota Komisi XI yang mengikuti pemili-



Ketua Komisi XI Fadel Muhammad bersama calon Deputy Gubernur BI

han tersebut.

“Erwin cocok memimpin sebagai Deputy Gubernur BI di bidang moneter dan makro-prudensial karena beberapa hal. Diantaranya terkait dengan pemaparan yang direspon positif oleh anggota komisi XI,” ungkap Ketua Komisi XI Fadel Muhammad.

Lebih lanjut Fadel menyampaikan bahwa pengalaman-pengalaman Erwin di skala Internasional, pandangan-pandangan terhadap dunia perbankan yang bagus dan *mumpuni* menjadi poin plus sehingga Erwin memenangkan voting.

Pimpinan Komisi dari Fraksi Partai Golkar ini juga menekankan, ada tiga Pekerjaan Rumah (PR) bagi Erwin dalam men-

duduki jabatannya. Pertama, membantu persiapan UU Bank Indonesia dan UU Perbankan. Kedua, mengatur kebijakan moneter yang saat ini perlu perhatian besar. Ketiga, harus banyak berkomunikasi ke publik untuk menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh BI.

“Saya optimis dia (Erwin) dapat bekerja dengan baik dan dapat membawa perbaikan di perbankan,” tegas Fadel, Senin (20/4).

Setelah disetujui Komisi XI selanjutnya Erwin Riyanto akan disahkan menjadi Deputy Gubernur Bank Indonesia bidang moneter dan makro-prudensial dalam rapat Paripurna DPR.

(skr) foto: naefuroji/parle/od

Harus Ada Koordinasi Lintas Kementerian Untuk Kembangkan Pariwisata

Pemerintah menargetkan 12 juta kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada 2015, dan 20 juta wisman pada tahun 2019. Target ini pun didukung DPR dengan mengesahkan tambahan anggaran pariwisata sebesar Rp 1 triliun pada APBN-P 2015. Namun, diperlukan kerja keras dan koordinasi dari Pemerintah untuk mencapai target tersebut.

Demikian disampaikan Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore, di sela-sela rapat kerja Komisi X dengan Menteri Pariwisata Arief Yahya dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf, di Gedung Nusantara I, Kamis (16/04/15).

“Kita tidak mungkin meningkatkan pariwisata jika tidak di-support hal pendukung lain. Infrastruktur dan sumber daya manusia kita lemah, angka penerbangan ke destinasi wisata sedikit. Tiga hal ini perlu kita perhatikan, perlu koordinasi lintas kementerian untuk mencapai target wisatawan ini,” tegas Jefri.

Politisi F-PD ini menjelaskan, infrastruktur untuk menuju destinasi pariwisata masih kurang memadai, seperti jalan. Termasuk infrastruktur perhotelan. Ia juga mengingatkan, yang perlu diperhatikan adalah untuk meningkatkan jumlah destinasi dan menambah jumlah penerbangan dari negara asal wisatawan ke destinasi wisata di Indonesia juga penting.

“Informasi dari Menteri sudah ada koordinasi. Namun, kenyataannya sejauh mana koordinasi itu, kami belum tahu. Jika pariwisata ini ingin ditingkatkan, maka koordinasi itu harus diperhatikan. Destinasi wisata



Anggota Komisi X DPR Jefirstson Riwu Kore

ditambah, bandara diperbaiki, pelatihan sumberdaya manusia juga ditingkatkan,” imbuh Jefri.

Politisi asal Dapil Nusa Tenggara Timur II ini menambahkan, tahun ini Kemenpar sudah mendapatkan tambahan anggaran Rp 1 triliun, diharapkan target 12 juta wisman dapat tercapai. Namun, di tahun-tahun mendatang, belum ada jaminan Kemenpar akan mendapatkan anggaran yang sama, malah bisa saja anggaran yang didapat lebih kecil. Sehingga, dikhawatirkan akan mempengaruhi pencapaian target wisatawan.

“Bicara target tahun ini yang 12 juta wisatawan, kita berikan tambahan anggaran Rp 1 triliun. Pertanyaannya, apakah ke depannya juga akan mendapatkan anggaran yang sama. Karena pengalaman beberapa tahun ini, anggaran untuk Kemenpar tidak mencapai Rp 1 triliun, bahkan hanya berkisar di angka Rp 500 miliar. Jika

kurang dari Rp 1 triliun, tentu target tidak akan tercapai,” papar Jefri.

Politisi yang juga Anggota Badan Legislasi DPR ini juga meminta Pemerintah mencermati kebijakan bebas visa untuk 30 negara. Pasalnya, walaupun diniatkan untuk mendatangkan pariwisata, dikhawatirkan hal ini malah mendatangkan ancaman *cyber crime*, terorisme, ataupun trafficking.

“Pemerintah harus antisipasi jika memang sudah memberikan bebas visa kepada 30 negara. Tujuan ini kan untuk peningkatan pariwisata Indonesia, saya yakin Pemerintah sudah mempertimbangkan secara matang, sehingga harus lebih ketat lagi dalam pengawasan,” harap Jefri.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi X Zufadhli menyatakan dengan anggaran Rp 2,5 triliun, rencana target 20 juta wisatawan pada tahun 2019, agak sulit tercapai. Ia menilai, perlu dukungan anggaran yang cukup besar, seperti untuk memperbaiki destinasi, sehingga pemasaran yang dilakukan tidak menjadi bumerang.

“Ketika kita sudah melakukan pemasaran besar-besaran, namun ternyata destinasinya belum siap, maka akan menjadi bumerang untuk kita sendiri, maka akan menghambat pencapaian target itu,” jelas Politisi F-PG ini.

Politisi asal Dapil Kalbar ini mengingatkan, hal yang penting untuk mencapai target kunjungan wisatawan, bukan hanya pemasaran, tapi juga pengembangan destinasi, dan bukan hanya berpusat di daerah yang memang sudah menjadi tujuan wisata. (sf)

foto: naefuroji/parle/od

Pemerintah Alpa Dalam Penanganan Persoalan Perempuan

Eksekusi mati yang dilakukan Pemerintah Arab Saudi terhadap TKW asal Indonesia, Siti Zaenab tanpa sepengetahuan keluarga dan pemerintah Indonesia, serta terkuaknya tabir prostitusi *online* dari penyusuran kasus pembunuhan seorang wanita di tempat kosnya di bilangan Tebet, Jakarta Selatan menurut Anggota Komisi VIII DPR RI, Kuswiyanto menjadi bukti pemerintah alpa dalam penanganan berbagai persoalan perempuan dan anak Indonesia.

“Semua kasus itu menjadi bukti bahwa pemerintah tidak hadir di berbagai persoalan perempuan. Padahal kita memiliki Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Bahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) tidak mengetahui secara utuh Kondisi persoalan-persoalan perempuan dan anak yang ada di Indonesia. Mestinya ada gambaran konkrit, bagaimana kondisi empirisnya, ini lho datanya yang betul-betul tersedia. Jangan hanya menyampaikan “data-



Anggota Komisi VIII DPR Kuswiyanto

nya ada-datanya ada” tetapi ternyata hanya prosentase. Dan tidak ada *action*,” papar Politisi dari Dapil Jawa Timur IX ini.

Kasus perempuan dan anak dari tahun ke tahun menurut pria yang biasa disapa Kus ini, bukannya semakin sedikit, malah seperti gunung es yang tinggal menunggu mencairnya. Kus mengatakan bahwa sejalan den-

gan perubahan nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semula hanya sebagai kementerian negara, maka ia berharap Kementerian itu mampu membuat sebuah *grand design* secara matang, baru kemudian dikoordinasikan dengan Kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah.

“Setelah Kementerian PP & PA membentuk *grand design* program-programnya, langsung *action* dan dikoordinasikan dengan berbagai Kementerian dan Lembaga atau institusi terkait misalnya Kementerian Sosial, Kementerian Agama dan Polri. Selesai itu tidak apa-apa Bu Menteri mau keliling setiap hari. Tapi tentu jangan sampai hanya keliling-keliling saja sementara hal-hal yang esensi ini tidak dikerjakan. Saya khawatir kalau banyak blusukan seperti ini nanti jadi keblusuk,” tegas Kus usai Rapat Kerja dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, Kamis (16/4). (Ayu)

foto: andri/parle/od

Peringkat Indeks Inovasi Indonesia Masih Rendah

Peringkat indeks inovasi Indonesia pada tahun 2014 berada di urutan ke 31 dari 148 negara. Walaupun mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, namun angka ini bisa dibilang cukup rendah, jika dikomparasi dengan negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura ataupun Thailand.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR Mohamad Sohibul Iman usai rapat kerja dengan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, Kamis (16/04/15). Agenda rapat diantaranya membahas mengenai rancangan renstra Kemenristekdikti 2015-2019.

“Sebenarnya perkembangan indeks inovasi kita sudah lumayan maju, karena sebelumnya kita berada di urutan 40-an. Tapi memang jika dikomparasikan dengan negara tetangga seperti di Malaysia, Thailand, atau Singapura, kita masih tertinggal. Mereka ada di urutan

20-an, bahkan Singapura ada di urutan angka belasan. Kita belum bisa berpuas diri dulu,” kata Sohibul.

Politisi F-PKS ini menjelaskan, dalam menciptakan inovasi diperlukan kerjasama *triple helix*, yaitu kerjasama antara lembaga teknologi, perguruan tinggi, dan dunia bisnis. Untuk Indonesia, seperti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (BPPT LIPI).

“Ketiganya harus bekerjasama dan bersinergi dengan baik. Kami berharap dengan penggabungan Ristek dan Dikti dapat meningkatkan itu, karena nanti ada semacam integrasi dan koordinasi. Jika koordinasi itu sudah tercipta, maka Insya Allah inovasi akan semakin meningkat,” harap mantan Wakil Ketua DPR Periode 2009-2014 itu.

Catatan dari Komisi X, tambah Politisi asal Dapil Jawa Barat XI ini, selain kerjasama *triple helix* itu, Pemerintah juga



Wakil Ketua Komisi X DPR Sohibul Iman

harus memperhatikan inovasi-inovasi yang diciptakan masyarakat. Sohibul menyebutnya dengan nama *grass root innovator*, yaitu masyarakat yang memiliki kreatifitas dalam berinovasi namun dengan ketiadaan modal, tidak punya akses pasar, dan sarana prasarana yang sedikit.

“Kita selain memperhatikan yang *triple helix* tadi, juga perlu melihat inovasi yang ada di masyarakat. Kalau itu

bisa dijalankan, menurut saya ke depannya inovasi akan meningkat,” imbuh Sohibul.

Ketika ditanya bagaimana penerapan hasil inovasi ini kepada masyarakat dan dunia usaha, Sohibul menyatakan masih sangat kurang. Terutama dunia usaha juga masih berpikir ulang harus menciptakan inovasi, namun belum terbayang keuntungannya. Padahal perguruan tinggi dan lembaga iptek pemerintah sudah cukup menciptakan inovasi.

“Dunia usaha tentunya tidak mau diajak menciptakan suatu inovasi jika tidak terbayang keuntungannya. Pemerintah harus mengembangkan skema-skema insentif, jika usaha ikut serta, akan menghasilkan keuntungan, atau setidaknya tidak rugi. Kemenristek perlu memberikan rangsangan agar dunia bisnis mau memanfaatkan dan bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga iptek pemerintah, untuk

mau memanfaatkan inovasi-inovasi yang telah diciptakan,” pesan Sohibul.

Prihatin Peringkat PT

Dalam kesempatan yang sama, Sohibul juga mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap peringkat Perguruan Tinggi (PT) Indonesia yang masih sedikit top 500 dunia. Bahkan tahun ini Indonesia hanya menempatkan dua perguruan tinggi dalam daftar itu.

“Ini cukup prihatin karena cuma dua yang masuk top 500 dunia. Sebelumnya pernah empat, sekarang cuma dua. Kami berharap kedepannya setidaknya ada lima, ini perlu kerja keras dari kita semua. Dengan beberapa program dari Pemerintah untuk meningkatkan itu, termasuk bagaimana dukungan akses kepada jurnal, sarana dan prasarana. Saya yakin itu dapat mendongkrak kita untuk masuk top 500 dunia,” imbuh Sohibul.

Masalah masih sedikitnya perguruan tinggi yang berakreditasi A, bahkan

jumlah prodi masih banyak berakreditasi C pun mendapat sorotan dari Sohibul. Pemerintah harus bekerja ekstra untuk hal ini.

“Kita sudah tahu standarnya untuk mendapatkan akreditasi A, kalau kriterianya itu bisa kita penuhi, kan bisa kita usahakan. Makanya pemerintah harus benar-benar fokus ke situ. Apa-apa yang menjadi persyaratan itu, harus digenjut,” saran Sohibul.

Sebelumnya, Menristek Muhammad Nasir menjelaskan, saat ini kontribusi terhadap daya saing masih rendah. Peringkat indeks Dikti berada di urutan 61, dan peringkat indeks inovasi masih di urutan 31. Inovasi dari dalam negeri pun masih rendah.

“58 persen teknologi industri masih dari luar, produk inovasi pun masih kecil. Kemudian belum banyak lahirnya perusahaan pemula berbasis teknologi,” jelas Nasir. (sf) foto: naefuroji/parle/od

Tata Kelola Perikanan Yang Baik Perlu Regulasi Tepat

Ketua Komisi IV DPR Edhi Prabowo mengatakan dengan besarnya potensi perikanan Indonesia diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan perekonomian. “Harus ada langkah-langkah meningkatkan kemampuan nelayan agar lebih baik,” katanya.

Hal itu dikemukakannya dalam Lokakarya bertajuk “Ikan Melimpah, Nelayan Susah, IQ rendah : Membangun Perikanan Yang Berkeadilan Bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk Kecerdasan Bangsa Indonesia”, di Ruang Rapat Komisi IV, Jakarta, Kamis (16/4).

Menurut politisi Partai Gerindra ini, besarnya potensi ekonomis perikanan nasional juga dihadapkan pada tantangan permasalahan yang krusial seperti lambatnya pertumbuhan sarana dan prasarana perikanan. Terdapat juga masalah lain seperti lemahnya penguasaan teknologi, kesulitan akses permodalan dan keuangan, perlindungan sosial, hingga ancaman kerusakan dan pencemaran lingkungan.

“Kondisi dan tantangan ini harus mampu dijawab Pemerintah melalui kebijakan yang tepat sehingga men-



Suasana Lokakarya Tata Kelola Perikanan di ruang rapat Komisi IV DPR

dukung terwujudnya pengelolaan perikanan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Dia meyakini perikanan Indonesia akan tetap bertahan, dan mampu mengatasi tantangan ke depan. Perikanan Indonesia diharapkan tetap mampu bersaing ditingkat regional maupun global dengan segala potensi yang dimiliki.

Kebijakan perikanan mendatang

harus menjadi harapan baru bagi Indonesia untuk memperkuat perekonomian. “Dengan pengembangan sektor perikanan diharapkan akan mampu mendukung terciptanya generasi mendatang yang lebih cerdas melalui peningkatan gizi penduduk dengan pemenuhan konsumsi produksi perikanan,” tegas Edhi.

Ketua Umum Himpunan Alumni (HA) -IPB Bambang Hendroyono mengemu-

kakan, persoalan bangsa Indonesia terkait Sumber Daya Manusia (SDM), yaitu Intelegent Quotient (IQ) rata-rata Indonesia termasuk yang paling rendah di tingkat ASEAN. Hal ini merupakan sebuah kenyataan yang tidak pernah terpikirkan jalan keluarnya, yang bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan generasi masa depan Indonesia.

Karena itu lanjut dia, perhatian terhadap peningkatan IQ nasional harus disinergikan dengan potensi-potensi lain yang dapat menjadi pendukung dari upaya peningkatan IQ anak-anak Indonesia. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kecukupan protein.

Dia menekankan, kompetisi SDM jika

tidak dihadapi dengan tidak hati-hati justru bisa melemahkan kita sebagai bangsa. Persoalan kualitas SDM menjadi penting untuk dicermati. “Kita membutuhkan sebuah strategi nasional yang tepat untuk bisa mengangkat IQ nasional generasi muda di masa depan, sumber protein dapat berkontribusi bagi kemajuan nasional terutama SDM,” kata Bambang menambahkan.

Sejalan dengan hal itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron mendukung *roadmap* perikanan utamanya untuk meningkatkan IQ. Ini sebuah karya propaganda gerakan dasar meningkatkan perikanan yang akan berdampak positif pada peningkatan IQ.

Dalam rangka meningkatkan per-

indungan dan pemberdayaan nelayan, Komisi IV juga terus berupaya agar nelayan yang dihadapkan oleh berbagai persoalan dapat dituntaskan. “HA-IPB memiliki *roadmap* peningkatan IQ yang didasarkan pada konsumsi perikanan, Komisi IV konsen pada sisi pengaturan perundangan,” jelas Herman.

Komisi IV memiliki prioritas pada penyusunan legislasi mengenai nelayan dan pembudidaya ikan. Hal ini juga didasari dengan keprihatinan, karena ironis bangsa mengharapkan IQ tinggi yang dihasilkan oleh perikanan, tapi di sisi lain penghasil ikan masih memprihatinkan. (as) foto: rizka/parle/od

Komisi X Siap Bantu Perjuangkan Prodi Universitas Mahendradatta



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam

Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisyam mengatakan, kedatangannya ke Universitas Mahendradatta dalam rangka mengetahui perkembangan universitas swasta di Bali. Unmah sebagai universitas swasta tertua di Bali juga menitikpkan aspirasi untuk bisa diperjuangkan di tingkat pusat.

Ketika menggelar pertemuan dengan jajaran Pengurus Yayasan, Rektor dan sejumlah mahasiswa universitas tersebut, Kamis (9/4) lalu, Ridwan Hisyam yang didampingi anggota Kunker Spesifik Moreno Soeprapto, Ida Bagus Putu Sukarta dan Rinto Subekti menyatakan sangat terkesan dengan

universitas ini. Bagi bangsa Indonesia, Universitas Mahendradatta dulu Universitas Marhaen, wajib mengetahui bagaimana *founding fathers* kita Bung Karno menemukan seorang *wong cilik* bernama Marhaen, di daerah Madiun.

Universitas ini menurut Ridwan, tetap melestarikan ajaran BK sebagai pendiri bangsa maupun sebagai ploklamator, sehingga apa yang diajarkan BK bisa menjadi pegangan bangsa Indonesia.

“Kalau sudah menjadi pegangan bangsa Indonesia, maka kita tidak bisa dikotak-kotakkan. Tidak ada yang mengatakan Bung Karno hanya milik salah satu golongan, tetapi milik bangsa dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Kehadiran Komisi X, juga mendapatkan informasi bahwa universitas ini tengah melebarkan 7 program studi (prodi), namun sekarang belum keluar dari Kementerian Ristek dan Pendidikan Tinggi. “Mohon berkas-berkas diserahkan dan kami akan perjuangkan agar Prodi tersebut bisa dikeluarkan Kementerian Ristek dan Perguruan Tinggi,” jelas politisi Golkar dari Jatim ini.

Menurutnya, Kementerian ini oleh Pemerintah sekarang dipecah dari sebelumnya Kemendikbud menjadi Kementerian Riset-Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Tapi Sekjen ke-

menterian ini dijabat oleh Sekjen yang sebelumnya Sekjen Kemendikbud. “Dengan demikian Insya Allah beliau mengetahui bagaimana peran Universitas Mahendradatta dalam mengem-

bangkan perguruan tinggi swasta di Bali,” ujarnya.

Meski sederhana dan kampusnya kecil, SDM dari Universitas ini siap bersaing dengan universitas lainnya.

Universitas ini salah satu 14 universitas swasta yang telah terakreditasi dari keseluruhan 54 PTS yang ada di Bali. (mp) foto: mastur/parle/od

Proses Penyusunan Legislasi Perlu Diketahui Masyarakat



Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg) Firman Subagyo

Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tiga fungsi utama, salah satunya yaitu fungsi legislasi. Dalam setiap penyusunan produk legislasi, dalam hal ini undang-undang, perlu diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga, masyarakat dapat mengetahui detail setiap proses penyusunan rancangan undang-undang.

Demikian diungkapkan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI (Baleg) Firman Subagyo, di Gedung Nusantara I, Kamis (16/04/15) kepada Parleментарia mengenai rencana kunjungan Baleg ke beberapa daerah dalam rangka Sosialisasi Prolegnas 2015-2019. Ia menyatakan, pentingnya UU yang menjadi payung hukum tata kelola negara diketahui masyarakat.

“Dalam amanat UU MD3 itu ada kewenangan kepada Baleg, bahwa Program Legislasi Nasional ini harus disosialisasikan kepada masyarakat. Karena UU adalah payung hukum yang menjadi landasan operasional dalam tata kelola pemerintahan. Sehingga UU yang akan kita undang ini, masyarakat juga bisa mengerti proses dari awal,” jelas Firman.

Politisi F-PG ini menambahkan, dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat ini, sekaligus akan menjawab banyaknya masyarakat yang selama ini selalu menuduh bahwa pembahasan UU di DPR itu dianggap tidak transparan. Padahal, tambahnya, dalam pembahasan UU ini sudah

melalui proses dan mekanisme yang sudah diatur.

“Dalam penyusunan UU ini juga dilakukan studi banding bahkan dilakukan *Focus Group Discussion* di beberapa perguruan tinggi secara terbuka dan transparan. Harapan kami, dengan adanya sosialisasi ini, masyarakat secara umum juga memahami proses yang terkait dengan penyusunan sebuah RUU menjadi UU. Dan kemudian implikasinya nanti juga masyarakat bisa melakukan kontrol terhadap UU yang sudah diundangkan, apakah ini dilaksanakan secara baik atau tidak oleh pemerintah,” imbuh Firman.

Oleh karena itu, tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah III ini, inisiatif yang positif dari Baleg ini diharapkan bisa memberikan nuansa baru kepada masyarakat. Dan diharapkan, ketika proses sosialisasi, masyarakat juga berani memberikan masukan-masukan terhadap RUU yang saat ini sedang disusun.

“Kita harapkan, semua pelaku usaha, *stakeholder* dari semua tingkatan masyarakat di daerah yang akan kami kunjungi, pemerintah daerah, dari kabupaten maupun provinsi, kita harapkan mereka juga bisa ikut memberikan masukan,” harap Firman.

Politisi yang juga Anggota Komisi IV ini menjelaskan, kunjungan Baleg dibagi menjadi empat tim, yang akan berkunjung ke empat daerah, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan, Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan ini, Firman akan memimpin tim kunjungan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada 20 April 2015.

“Sosialisasi yang kita lakukan di Banjarmasin terkait tentang revisi UU Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba). Dimana Kalimantan itu adalah sentralnya batubara, sehingga diharapkan dapat didapatkan masukan terhadap UU, apa yang selama ini plus minus atau untung ruginya bagi daerah terhadap kegiatan pertambangan ini,” tukas Firman.

Dengan begitu, tambah Firman, masukan dari *stakeholder* di daerah dapat menjadi masukan yang baik untuk DPR, sehingga akan menjadi bahan revisi UU.

“Masukan dari masyarakat akan menjadi sangat baik bagi DPR, karena pada dasarnya dalam pembuatan UU dan penyempurnaan UU ini orientasinya lebih mengedepankan kepentingan nasional, meningkatkan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat yang ada di daerah tersebut,” tutup Firman.

Selama di Kalimantan Selatan, tim kunjungan Baleg akan mensosialisasikan mengenai Prolegnas 2015-2019 dan Prolegnas RUU Prioritas 2015 melalui pertemuan dengan Gubernur Kalsel beserta jajaran Muspida, DPRD, Kapolda beserta jajaran, Asosiasi Pengusaha Pertambangan, Kadin serta civitas akademik. (sf) foto: iwan armanias/parle/od

Penyusunan UU Harus Perhatikan Aspirasi Daerah



Anggota Badan Legislasi DPR Abdul Fikri Faqih

Badan Legislasi DPR, dalam setiap penyusunan Undang-undang diharapkan dapat memperhatikan aspirasi daerah. Mengingat, UU yang dihasilkan akan menjadi payung hukum, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat.

Demikian dikatakan Anggota Badan Legislasi DPR Abdul Fikri Faqih, saat kunjungan kerja Baleg DPR ke Provinsi Kalimantan Selatan, dalam rangka

sosialisasi Program Legislasi Nasional 2015-2019, di Banjar Baru, Kalsel, Senin (20/04/15).

“Pemerintah Daerah kerap merasa tidak diajak duduk bersama, sehingga regulasi yang lahir kurang didukung oleh daerah. Padahal pelaksana langsung di lapangan adalah Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota,” katanya.

Politisi F-PKS ini mengakui, banyak UU atau regulasi yang justru menyulitkan pihak Pemda dalam membangun wilayahnya. Sehingga, ia mengusulkan, penyusunan Undang-undang bersama pemerintah pusat, diadakan sesi rapat dengar pendapat (RDPU) dengan pihak Pemda maupun *stakeholder*.

“Produk regulasi saat ini cenderung kurang aplikatif, bahkan tidak memiliki kepekaan terhadap masalah faktual yang dihadapi daerah. Setiap RUU yang diusulkan harus selalu mengakomodir aspirasi dari daerah, karena pelaksana langsung adalah daerah sendiri,” tambah Politisi asal Dapil Jawa Tengah IX ini.

Hal senada diungkapkan Anggota Baleg Rieke Diah Pitaloka. Politisi F-PDIP ini menilai, masukan atau aspirasi dari daerah, tidak boleh disepelekan. Karena pada akhirnya, UU yang disusun DPR dan Pemerintah Pusat yang akan terkena dampaknya adalah Pemda dan masyarakat.

“Mengenai revisi UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, saya berharap arahnya adalah distribusi keadilan antara pusat dan daerah,” harap Politisi asal Dapil Jawa Barat VII ini. (sf)

foto: sofyan/parle/od

Jelang Subuh Komisi VIII Berhasil Turunkan BPIH 2015

Setelah melalui kerja keras dan pembahasan maraton akhirnya Panitia Kerja (Panja) Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Komisi VIII DPR berhasil menurunkan BPIH tahun 2015. “Alhamdulillah hari Ini Rabu (22/4) jam 3,30 dini hari kami telah menyelesaikan rapat Panja BPIH,” ujar Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR, Sodik Mudjahid dini hari di ruang kerja Komisi VIII, Senayan Jakarta.

Dijelaskan politisi dari fraksi partai Gerinda ini, pihaknya telah berhasil menurunkan biaya perjalanan ibadah haji tahun ini dengan selisih hingga 502 dolar Amerika Serikat dibanding

dengan BPIH tahun 2014 lalu yang sebesar 3219 dolar AS. Serta selisih 478 dolar Amerika dibanding jumlah yang diajukan Menteri Agama pada bulan Februari yakni sebesar 3195 dolar AS.

Sodik mengatakan jumlah tersebut merupakan hasil penyisiran Panja BPIH Komisi VIII yang diambil dari RDP dengan berbagai pihak, termasuk pihak Kementerian Perhubungan dan Mantan Dirjen PHU (perjalanan haji dan umrah) Kementerian Agama, serta pengawasan langsung di tanah suci beberapa waktu lalu.

“Penurunan BPIH ini tentu tidak mengurangi kualitas dan kuantitas



Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Sodik Mudjahid

dari pelayanan haji yang akan diterima para calon jemaah haji,” pungkasnya seraya mengatakan penetapan resminya akan berlangsung siang ini bersama dengan Menteri Agama. (Ayu)

foto: iwan armanias/parle/od



Komisi VIII DPR Berhasil Tekan BPIH 2015

Panitia Kerja (Panja) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibentuk Komisi VIII DPR RI berhasil menekan biaya haji jauh lebih signifikan. Kini, besaran BPIH untuk tahun 1436 H/2015 M sebesar Rp33.962.500 atau 2.717 USD per jamaah.

“Tidak ada satu pun anggota Komisi VIII yang ikut-ikutan mencari keuntungan dalam penentuan BPIH ini,” tandas Ketua Komisi VIII Saleh P Daulay (dapil Sumut II) dalam konferensi pers di Press Room DPR, Rabu (22/4). Komisi VIII bersama pemerintah sepakat menentukan besaran BPIH setelah melakukan rapat maraton sejak 29 Januari hingga 22 April dini hari.

Dalam penentuan besarnya BPIH tersebut, Panja Komisi VIII telah menyisir berbagai pos anggaran yang selama ini sulit ditekan. Misalnya, biaya pesawat Garuda, pemondokan di Arab Saudi, dan catering. Dengan investigasi

langsung ke lapangan, baik di dalam negeri maupun ke Arab Saudi, akhirnya banyak pos anggaran yang ditekan dengan tetap menjaga kualitas layanan haji.

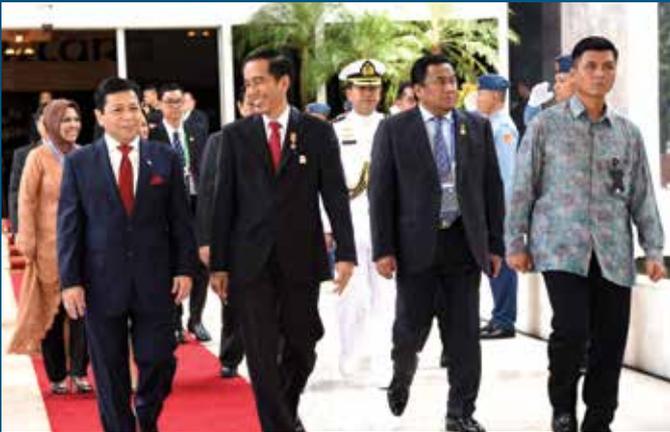
Selain Saleh Daulay, hadir dalam konferensi tersebut Ketua Panja Sodik Mujahid (dapil Jabar I), Deding Ishak (dapil Jabar III), Kuswiyanto (dapil Jatim IX), Achmad Fauzan Harun (dapil DKI I), Abdul Fikri (dapil Jateng IX), Maman Imanulhaq (dapil Jabar IX), dan Hasan Aminuddin (dapil Jatim II).

Ini merupakan kerja monumental dari Komisi VIII DPR yang serius menekan biaya haji menjadi lebih murah dan berkualitas. Pada periode sebelumnya, upaya Komisi VIII menekan biaya haji menemukan kegagalan. Kini, setelah didukung data dan investigasi yang valid, Kementerian Agama akhirnya bisa bersepakat dengan Komisi VIII untuk melakukan penghematan biaya

haji. Bila dihitung dengan dolar, berarti turun 502 USD dari tahun sebelumnya.

Bila dirupiahkan, BPIH justru naik sebesar Rp163.000. Seperti diketahui BPIH tahun 2014 sebesar Rp33.799.500. Kuswiyanto menuturkan, semua biaya diukur dengan rupiah. Tidak lagi dengan dolar. Sementara Sodik Mujahid menilai, Kemenag ternyata tidak memiliki data dan analisis yang akurat soal ini.

Sebaliknya, Komisi VIII sangat unggul dengan data dan analisis yang didapat dari berbagai sumber dan investigasi, termasuk data dan investigasi dari para tenaga ahlinya. “Panja menguasai data untuk mengkonter data Kemenag,” ungkap Sodik. Biaya pemondokan juga dikemukakan Abdul Fikri. Diungkapkannya, biaya pemondokan di Arab Saudi yang semula 7 ribu real, kini menjadi 4.700 real. Itu hasil negosiasi Komisi VIII. (mh) foto: andri/parle/od



Suasana Konferensi Parlemen Asia Afrika dengan tema *Strengthening the Role of Parliament in South-South Cooperation to Promote World Peace and Prosperity* yang dihadiri oleh 33 Delegasi dari negara Asia dan Afrika yang berlangsung di Gedung DPR RI Senayan, Kamis (23/04)

Foto: TIM PARLEMENTARIA DPR RI

KONFERENSI PARLEMEN ASIA-AFRIKA

